
JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 8 NO 2
JULI 2022

jrak@plb.ac.id

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso)

Niken Wahyu Cahya Christianti¹, Yulinartati², Astrid Maharani³ - Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

This study aims to determine the role of accounting in realizing Good Governance. The principles of Good Governance used in this research are accountability, transparency, responsibility, strategic vision, efficiency and effectiveness. The type of research used is qualitative research. Data collection techniques using interview techniques, observation, literature study, documentation techniques, internet searching. The results show that accounting has a very important role in realizing good governance. The role of accounting in realizing accountability is a benchmark for assessing the performance of Sukowiryo Village, Bondowoso Regency, and can also support public sector organizations to account for all tasks and authorities carried out in accordance with the goals that have been set. In realizing transparency, accounting can guarantee the accuracy and truth of the information disseminated in the village. Meanwhile, in realizing responsibility, accounting can help accountability for the use of APBDes and RKP-Village funds in Sukowiryo Village, Bondowoso Regency. The role of accounting in realizing the strategic vision is to assist in the preparation of the RKP-Village which can be used to consider costs with the aim of achieving the targets to be set. The role of accounting in realizing efficiency and effectiveness is to be able to assist the process of budgeting funds so that they can be carried out optimally. Barriers to the role of accounting in realizing good governance are not too serious for the sustainability of the program of activities carried out, namely human resources who do not understand accounting, but it is not a big problem to realize good governance in society. everything can be handled properly by conducting socialization and accounting training.

Keywords: *The Role of Accounting, Good Governance, Public Sector Organizations, Villages.*

PENDAHULUAN

Di era reformasi saat ini, birokrasi Indonesia belum berkembang dengan baik karena masih banyak lembaga publik yang percaya bahwa rakyat lah yang membutuhkannya. Asumsi ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut, sehingga kinerja organisasi sektor publik yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku juga negatif bagi

masyarakat umum. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hilang terhadap kinerja organisasi sektor publik dan melayani masyarakat dengan mendorong organisasi sektor publik untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata kelola yang baik agar dapat mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada organisasi publik dan dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. (Muchammad Romy Ashari, 2019; Susilawati, 2017).

Good Governance adalah konsep suatu pola atau metode yang dapat terwujud jika memiliki tiga pilar pendukung yang dapat berfungsi dengan baik yaitu negara, masyarakat dalam suatu negara, dan sektor swasta. Konsep *good governance* bukanlah topik baru dalam bidang akuntansi publik, namun sebagai lembaga pemerintahan terendah di Indonesia, belum banyak penelitian yang membahas topik *good governance* dalam keuangan desa. Pelaksanaan otonomi daerah di tingkat desa tidak kuat dan bermanfaat bagi masyarakat kecuali didukung oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. (Rustiarini, 2016; Napisah & Taufiqurachman, 2020; Tachyan, 2015). Peran akuntansi di lembaga publik ini adalah membantu dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Dengan demikian, informasi laporan keuangan Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso dapat diandalkan dan transparan menuju *good governance* itu sendiri. Dalam organisasi sektor publik, peran akuntansi dalam mencapai tata kelola yang baik sangat penting untuk membantu menciptakan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efektivitas dan efisiensi, dan visi strategis. Akuntansi bukan hanya sarana pencatatan proses ekonomi, tetapi tujuan dari semua proses.

Di dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso sangat penting untuk di libatkan atau di dilaksanakan dengan baik di dalam Pemerintahan Daerah atau Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, Pemerintah desa adalah bagian terkecil dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pemerintah di desa memainkan peran penting dalam pembangunan. Jika pembangunan setiap desa berhasil dan maksimal, maka tujuan pemerintah pusat untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kemakmuran akan tercapai. Namun, situasi di beberapa wilayah Indonesia tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah sangat penting, karena desa berhak mengatur secara bebas dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso adalah salah satu organisasi sektor publik dari lembaga pemerintahan negara. Dalam hal ini kantor desa menjadi wadah bagi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di desa. Sebagai organisasi sektor publik, Desa Sukowiryo harus mampu memenuhi kebutuhan dan hak semua bentuk masyarakat. Melayani masyarakat sangat penting untuk diterapkan dan diprioritaskan. Tata kelola yang baik memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu, desa Sukowiryo harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta laporan keuangan juga harus akuntabel dan transparan. Desa Sukowiryo masih kurang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang melibatkan Akuntansi di dalamnya yang berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

Untuk dapat menghasilkan kinerja organisasi sektor publik yang maksimal dan menerapkan prinsip yang kuat dalam tata kelola organisasi sektor publik, kantor desa Sukowiryo juga dapat menggunakan model pengukuran kinerja *New Public Management* guna untuk mengidentifikasi setiap program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan uraian di

atas, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di desa adalah dengan meningkatkan prinsip tata kelola yang baik atau *Good Governance* dengan memunculkan akuntansi didalamnya, guna dapat meminimalisir dan mempersiapkan terjadinya penyelewengan dana desa dan dapat meningkatkan kinerja akuntansi desa serta bertanggung jawaban kegiatan dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah.

LANDASAN TEORI

New Public Management

New Public Management atau yang sering di singkat NPM merupakan sebuah paradigma baru didalam tata kelola organisasi sektor publik yang pertama kali berkembang pada tahun 1980-an, terutama di negara Inggris, Amerika Serikat, dan Selandia Baru sebagai akibat munculnya krisis kesejahteraan negara. Perspektif “*New Public Management*” atau adminisrasi publik, menggunakan pendekatan bisnis sektor swasta dan sektor publik. Selain berbasis pada teori pilihan publik, dukungan intelektual pada perspektif ini berasal dari aliran kebijakan publik atau *public policy schools* dan *managerialism movement*. Aliran dari kebijakan publik dalam beberapa dekade sebelum ini memiliki akar yang cukup kuat dalam sebuah ilmu ekonomi, sehingga analis kebijakan dan para ahli yang menggeluti evaluasi kebijakan terlatih dengan *market cost and benefit, economics, dan rational models of choice*. Selanjutnya, aliran ini mulai mengalihkan perhatiannya pada implementasi kebijakan, yang selanjutnya mereka sebut sebagai *public management* (Puspawati, 2016).

Teori Y

Teori Y adalah kebalikan dari teori X, dengan penjelasan cara pandang yang melihat manusia dari sisi positif dan cara pandang yang lebih modern. Teori Y mempunyai anggapan bahwa:

1. Manusia sebagai anggota suatu organisasi pada umumnya menikmati dan menyukai pekerjaannya. Bekerja itu seperti bermain, bersenang-senang, dan istirahat, jadi tidak ada beban.
2. Manusia dapat mengendalikan diri mereka sendiri sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi mereka dan tidak perlu mengawasinya. Mereka juga menepati janji, jadi tidak perlu menjatuhkan sanksi.
3. Manusia dalam suatu organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, inovatif, imajinatif, serta memiliki kemampuan dan kreativitas untuk memecahkan masalah yang ada dalam organisasi.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa Teori Y lebih dinamis karena menunjukkan potensi untuk berkembang. Ia menekankan perlunya penyesuaian yang selektif dan ketat. Dari McGregor's, Teori Y Ini mengasumsikan bahwa orang pada dasarnya kreatif dan menyesuaikan diri di tempat kerja ketika termotivasi dengan baik dan benar. (Hersey, 2002).

Good Corporate Governance

Tidak bisa dipungkiri istilah *Good Corporate Governance* (GCG) semakin populer. Tidak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi yang sangat terhormat. *Governance* sendiri merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada

keseimbangan dan kerjasama yang setara dalam rangka mengembangkan *good governance* (Astuti & Yulianto, 2016). *Corporate Governance* digambarkan sebagai sarana dalam bentuk mekanisme dan struktur yang menyediakan peraturan dan aturan pelaksanaan yang digunakan organisasi dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuannya. Perancangan sistem yang digunakan bertujuan untuk memudahkan dan menyediakan mekanisme *check and balance* yang digunakan untuk menjaga keseimbangan organisasi dengan menunjukkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi.

Good Governance

Governance dapat diartikan sebagai cara untuk mengelola urusan publik. (World Bank, 1992), mendefinisikan bahwa *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Dalam hal ini, *world bank* menekankan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat luas. Kunci terpenting untuk memahami tata pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pemerintahan yang bertanggung jawab dan baik hanya dapat dicapai apabila dalam penerapan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki interaksi dan jaringan yang setara. *Good governance* mempunyai banyak prinsip yang terkandung dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari kepastian hukum, kepentingan umum, tertib penyelenggaraan negara, proporsionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.

Akuntansi

Berdasarkan ASOBAT atau *A Statement of Basic Accounting Theory* dalam (Harahap, 2015), Akuntansi merupakan proses mengukur, mengidentifikasi, serta mengkomunikasikan informasi ekonomi sebagai bahan informatif dengan tujuan memungkinkan pengguna untuk mempertimbangkan berbagai alternatif ketika menarik kesimpulan. Menurut (Bank Indonesia, 2019), definisi akuntansi yang umum yaitu di pergunakan untuk menjelaskan terminology “akuntansi” adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh *American Institute of Certified Publik Accounting* (AICPA) bahwa : “Akuntansi merupakan seni penggolongan, peringkasan, dan pencatatan kejadian dan transaksi yang bersifat keuangan yang berbentuk satuan uang ,dengan cara yang berdaya guna, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.” Akuntansi memiliki arti yang sangat luas bahwa semua proses memiliki tujuan dan tidak dapat hanya diartikan sebagai alat untuk mencatat peristiwa ekonomi.

Organisasi Sektor Publik

Organisasi secara luas dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Menurut (Mahsun *dkk*, 2007), Berbagai organisasi termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai perusahaan dimana pemerintah memiliki saham (BUMN), Organisasi Pendidikan, Organisasi Kesehatan dan Organisasi Masyarakat/Massa telah terwakili dalam sektor publik di Indonesia. Menurut (Bastian, 2006), Organisasi Publik di Indonesia merupakan organisasi yang menggunakan dana masyarakat seperti: Organisasi Pemerintah Daerah, Organisasi LSM dan Parpol, Organisasi Pemerintah Pusat, Organisasi Tempat Peribadatan, Organisasi Yayasan, Organisasi Pendidikan dan Kesehatan.

Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB)

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat peraturan yang dikeluarkan oleh bupati untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini pedoman peraturan Bupati Bondowoso yang sesuai antara lain, yaitu :

- a. Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB) Nomor 46 Tahun 2020
Dalam PERBUB Bondowoso nomor 46 Tahun 2020 penjabaran mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat Kabupaten Bondowoso yang sangat penting untuk dilibatkan atau dilaksanakan dengan baik didalam Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Desa.
- b. Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB) Nomor 35 Tahun 2015
Di dalam PERBUB Bondowoso nomor 35 tahun 2015 mengenai peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bondowoso nomor 6 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sangat penting guna sebagai acuan organisasi desa serta tata kerja pemerintahan desa agar selalu sesuai peraturan dan target yang telah direncanakan.
- c. Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB) Nomor 8 Tahun 2017
Di dalam PERBUB Bondowoso nomor 46 Tahun 2020 penjabaran mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. PERBUB ini sangat sesuai untuk dilibatkan atau dilaksanakan dengan baik dalam pemerintahan desa guna sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan agar dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan secara akuntabel dan transparansi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB) Nomor 66 Tahun 2016
PERBUB Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sangat penting sebagai pedoman ataupun acuan desa guna untuk menyusun laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bondowoso.
- e. Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB) Nomor 4 Tahun 2020
PERBUB Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sangatlah penting karena urusan menyangkut hal tersebut sangat penting guna untuk dapat mengawasi seluruh kegiatan mengenai dana desa agar melenceng atau menyalahi peraturan yang ada.

PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab organisasi sektor publik untuk semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam rencana kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Suatu organisasi publik telah berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas apabila dapat melaksanakan dengan benar seluruh kegiatan yang terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun masyarakat. (Muchammad Romy Ashari, 2019; Napisah, 2015. Menurut penelitian terdahulu dari (Muchammad Romy Ashari, 2019), Peran akuntansi dalam mencapai akuntabilitas organisasi sektor publik sangat penting, karena dengan adanya akuntansi organisasi sektor publik lebih mudah untuk melakukan tugas atau wewenang yang diberikan sehingga dapat melakukannya

sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Eka Windu selaku bagian Sekertaris Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yang menyatakan: “Akuntansi sangat membantu dalam mencapai akuntabilitas dan dipermudah dengan adanya sistem akuntansi yang memenuhi kewajiban dan wewenang tertentu. hal ini mendukung kinerja kita untuk menjadi lebih baik di masa depan.”

Kegiatan yang menunjukkan adanya akuntabilitas di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yang telah saya teliti yaitu adanya musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan Rencana Kerja Peremerintahan Desa (RKP-Desa) tahun 2021. Proses pembentukan RKP Desa di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah desa selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Dengan melibatkan Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat desa dan peran serta masyarakat Desa Sukowiryo dalam menentukan prioritas program sebagai arah mensejahterakan masyarakat desa. Setelah selesai disusun, selanjutnya RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa merupakan dokumen penjabaran dari RPJM Desa dengan periode 1 tahun, sedangkan kegiatan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau kegiatan yang dilakukan untuk periode 6 tahun. Adapun uraian kegiatan RKP-Desa Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021, adalah :

1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19.

Pada tahun 2021 tidak ada kegiatan fisik yang dilaksanakan, hanya saja ada pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk covid-19 melalui penyaluran BLT-DD. Kegiatan penyaluran BLT-DD di adakan karena kondisi desa saat itu banyak warga yang terpapar covid-19. Penyaluran BLT-DD di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sejumlah 40%/ Salah satu contoh dari RKP-Desa Sukowiryo mengenai covid-19 yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan mengenai penyaluran BLT-DD. Perencanaan penyaluran BLT-DD pada tahun 2021 beranggotakan Kepala desa, staff desa, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang mewakili. Pelaksanaan penyaluran BLT-DD dilaksanakan di balai desa dengan 135 Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan sejumlah dana Rp.300.000 selama 12 bulan. Selanjutnya pelaporan kegiatan tersebut akan di masukkan kedalam RKP-Desa. Bantuan penyaluran dana dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso.

2. Kegiatan PPKM Covid-19.

Melalui pemberdayaan masyarakat kegiatan selanjutnya mengenai Covid-19 dengan adanya PPKM yang terjabar dengan adanya kegiatan Sosialisasi Covid-19, bagi-bagi masker, serta penyemprotan cairan desinfektan di daerah sekitar Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso guna untuk memperkecil angka yang terpapar virus Covid-19. Sosialisasi Covid-19 diadakan di balai Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso dengan dihadiri oleh RT/RW setempat yang bertempat berdaerah di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso guna agar RT/RW tersebut dapat menyampaikan kegiatan sosialisasi Covid-19 kepada warga nya. Selanjutnya kegiatan bagi-bagi masker oleh staff desa dilakukan pada saat sosialisasi yang di hadiri RT/RW serta pembagian di jalan-jalan raya depan Kantor Desa sukowiryo Kabupaten Bondowoso. Kegiatan selanjutnya adanya penyemprotan cairan desinfektan yang dilakukan di setiap rumah di desa sukowiryo guna untuk mensterilkan dari virus Covid-19 yang pada saat itu angka terpapar virus tersebut sangat tinggi.

3. Kegiatan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK).

Melalui pemberdayaan masyarakat kegiatan RPJMDes yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan mengenai MCK yang di jabarkan sebagai berikut :

a. Perencanaan.

Pada Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowos ini dengan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam MCK dengan contoh adanya sumber air bersih MCK, kelengkapan kamar mandi, tempat cuci, kakus beserta kegunaannya, ketentuan agar MCK dapat berfungsi, tata cara pemanfaatan MCK, cara pemeliharaan bangunan atas MCK. Kegiatan perencanaan meliputi tiga aspek, yaitu analisis, kebijakan, dan pelaksanaan.

b. Pelaksanaan

Perencanaan pembangunan MCK dilaksanakan dengan bantuan yang berasal dari anggaran ADD. MCK salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air oleh beberapa keluarga dilokasi pemukiman tertentu yang dinilai tingkat kemampuan ekonomi rendah dan berpenduduk cukup padat. Mereka merasa ada kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk menjaga MCK agar tetap terawat dan layak pakai.

c. Pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban penyelenggaraan kegiatan Mandu Cuci Kakus atau MCK di Desa Sukowiryo akan dipertanggung jawabkan dan di cantumkan dalam laporan pertanggungjawaban desa.

Oleh karena itu, organisasi sektor publik sangat membutuhkan akuntansi untuk mencapai salah satu prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas. Hal ini karena akuntansi menetapkan tujuan dan sasaran memberikan tolak ukur untuk menentukan kinerja organisasi sektor publik. Akuntansi juga membantu organisasi sektor publik untuk menjelaskan semua tugas dan wewenang yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dimaksudkan. Jika dapat mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka akan dapat mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Transparansi

Prinsip transparansi adalah keterbukaan informasi yang diciptakan oleh organisasi sektor publik, dimana informasi tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dan kredibel oleh informan. Konsep transparansi itu sendiri tidak telanjang, tetapi berarti adanya suatu sistem yang memungkinkan adanya keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan tentang isu-isu yang terjadi di dalam suatu organisasi. (Risha Novia, 2021). Menurut penelitian terdahulu dari Risha Novia (2021), Peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi organisasi sektor publik sangat penting. Informasi yang disebarluaskan tidak hanya berupa laporan kegiatan, tetapi juga keterbukaan informasi tentang kejelasan pelaksanaan program kegiatan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Pernyataan tersebut didukung oleh Edi Suparto selaku Bagian Umum di Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sebagai berikut: "Akuntansi memainkan banyak peran dalam mewujudkan transparansi. Melalui keterlibatan akuntansi membantu menyebarkan informasi yang kami kumpulkan dengan keyakinan bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa kami harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi pada organisasi sektor publik sangatlah penting, seperti halnya kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Desa Sukowiryo

Kabupaten Bondowoso untuk menunjukkan adanya transparansi yaitu menyebarkan informasi yang akurat dan benar berkaitan dengan laporan kegiatan maupun kejelasan pelaksanaan kegiatannya yang telah di cetak dan tersedia dalam bentuk banner dan di pasang di depan balai desa. Contoh transparansi mengenai kegiatan yang telah teruraikan dalam RKP Desa, sebagai berikut:

1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19
Kegiatan yang menunjukkan adanya transparansi di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yaitu adanya keterbukaan dalam penyusunan laporan kegiatan mengenai BLT-DD Covid-19 di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso, serta adanya transparansi nominal yang di gunakan dalam kegiatan BLT-DD kepada masyarakat sekitar dengan cara pada saat pembagian BLT-DD ada bukti nyata berupa dokumentasi berupa foto pada saat pemberian serta banner mengenai penerimaan nominal penyaluran BLT-DD pada masyarakat dan adanya data masyarakat yang termasuk dalam kriteria penerimaan BLT-DD.
2. Kegiatan PPKM (sosialisasi Covid-19, Bagi-bagi masker, serta penyemprotan desinfektan)
Kegiatan yang menunjukkan adanya transparansi di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yaitu keterbukaan mengenai laporan kegiatan, laporan keuangan serta dokumentasi berupa foto kegiatan PPKM serta adanya banner mengenai tata laksana kegiatan PPKM dengan kegiatan yang antara lainnya sosialisasi Covid-19, bagi-bagi masker, serta penyemprotan desinfektan di area Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso.
3. Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK)
Kegiatan yang menunjukkan adanya transparansi dalam kegiatan pembangunan MCK di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yaitu dengan adanya keterbukaan mengenai penyusunan laporan kegiatan pembangunan kepada masyarakat dengan cara adanya banner mengenai kegiatan pembngnan MCK, yang antara lain keterbukaan mengenai harga alat dan bahan, harga jasa yang digunakan saat pembangunan, serta harga makan dan minum untuk jasa yang digunakan agar semua kegiatan transparan antara perangkat desa dengan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan MCK menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk mewujudkan transparansi dengan memasukkan peran akuntansi di dalam kegiatan di kantor desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso. Kebijakan dan capaian desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sudah selayaknya tersedia dan terbuka bagi publik dengan menyediakan data berdasarkan arus informasi yang bebas. Seluruh proses kegiatan yaitu penyusunan APBDes dan RKPdesa, serta informasi lainnya perlu dapat diakses oleh pemangku kepentingan, dan informasi yang tersedia dapat membangun rasa percaya antara pemerintahan desa dan masyarakat.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Responsibilitas

Peran akuntansi dalam mewujudkan responsibilitas adalah akuntansi dapat berperan dalam membantu untuk penggunaan dana APBDes untuk melaksanakan kewajiban dan wewenangnya. Akuntansi membantu memastikan agar nilai output yang dikeluarkan untuk pelaksanaan suatu program kegiatan sudah sesuai dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai ekonomis dalam penggunaan APBDes. (Muchammad Romy Ashari, 2019). Akuntansi juga dapat membantu Staff desa atau perangkat desa dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan APBDes serta Anggaran anggaran lainnya dengan baik dan maksimal. Perangkat desa akan merasa sangat terbantu dan sangat menyukai pekerjaannya jika dapat dimudahkan dalam pengerjaan tugas dan

wewenangannya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya Teori Y yang menegaskan bahwa “manusia yang tergabung dalam suatu organisasi umumnya menyukai dan menikmati pekerjaannya. Bekerja sama dengan bermain dan istirahat, jadi tidak membebani diri sendiri”. Berdasarkan Teori Y yang beranggapan seperti hal tersebut, Para pemimpin dapat menggunakan teknik motivasi dengan memberikan penghargaan, otonomi, tanggung jawab, partisipasi, pemberdayaan, dan peluang pertumbuhan dan pertumbuhan. (Douglas McGregor, 2000). Hal ini selaras dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Edi Suparto selaku Bagian Umum Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sebagai berikut: “Sistem akuntansi yang baik akan sangat membantu kantor desa Sukowiryo dalam menjalankan program kegiatan yang disusun dengan menggunakan dana APBDes, dengan tujuan agar ADD bernilai ekonomis. Jadi, menurut saya, akuntansi membantu penggunaan dana APBDes untuk menjalankan tugas secara optimal dan maksimal di kantor desa Sukowiryo”.

Kegiatan yang menunjukkan adanya Responsibilitas di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sebagaimana pengamatan dari peneliti serta diikuti oleh hasil wawancara menunjukkan bahwa Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso responsif dalam melayani masyarakat. Contoh kegiatan yang menunjukkan adanya Responsibilitas dalam uraian kegiatan RKP-Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso, yaitu :

1. Penyaluran BLT-DD Covid-19.

Kegiatan yang menunjukkan adanya Responsibilitas dalam kegiatan penyaluran BLT-DD yaitu Kepala desa serta staff perangkat desa ikut serta dalam penyaluran BLT-DD tersebut, ikut membagi-bagikan dana tersebut serta mendata masyarakat desa yang mendapatkan dana desa tersebut dan perangkat desa memberikan pelayanan yang terbaik serta bertanggungjawab atas kegiatan tersebut dan responsif mengenai keluhan masyarakat desa Sukowiryo dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tersebut.

2. Kegiatan PPKM.

Kegiatan yang menunjukkan adanya Responsibilitas dalam kegiatan PPKM yaitu keikutsertaan kepala desa dan staff desa dalam mengadakan sosialisasi Covid-19, ikut membagikan masker kepada masyarakat, serta ikut membantu menyemprotkan cairan desinfektan dalam kawasan Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Kegiatan Pembangunan MCK (Mandi Cuci, Kakus).

Kegiatan yang menunjukkan adanya Responsibilitas dalam kegiatan Pembangunan MCK yaitu staff desa ikut membantu dan menyediakan alat dan material bahan yang di butuhkan dalam pembangunan MCK tersebut dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan MCK.

Responsibilitas kinerja kepala desa serta staff desa yang terwujud dari pemahaman akan tanggung jawab pelaksanaan tugas sudah sangat terlihat di Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso. Tanggung jawab kepala desa dan staff desa telah berdasarkan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) sesuai peraturan yang berlaku di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi diperlukan untuk mencapai salah satu prinsip *good governance* yaitu responsibilitas dalam organisasi sektor publik. Hal ini dikarenakan akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana dari APBDes dan ADD. Sistem akuntansi yang sesuai akan membantu untuk menjelaskan dalam Penggunaan Dana APBDes, dan RKPDesa dengan membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi

APBDes, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang berguna untuk pelaporan laporan kegiatan. Laporan keuangan diaudit oleh BPK sebagai bukti telah optimal dan maksimalnya penggunaan dana dari APBDes dan Dana Desa oleh organisasi sektor publik.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Visi yang Strategis

Visi strategis merupakan salah satu prinsip yang erat kaitannya dengan perencanaan dalam menentukan program atau rencana kegiatan strategis di masa depan dalam organisasi sektor publik. Rencana kerja dirancang untuk meningkatkan kinerja atau mempertahankan hasil kinerja dari tahun sebelumnya. Rencana kerja akan dilaksanakan dengan pendanaan pemerintah berupa pendanaan APBDes (Risha Novia, 2021). Menurut penelitian terdahulu dari (Risha Novia, 2021), Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso agar dapat terwujud maka Akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam menentukan rencana kerja yang akan disusun. Akuntansi dapat menerapkan metode *cost-effectiveness* (biaya efektif) dalam menentukan rencana kerja pemerintah desa. Artinya, dapat menggunakan dana APBDes secara efisien dan efektif sesuai visi strategis dengan menekan biaya yang dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Eka Windu selaku Sekertaris Desa pada Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sebagai berikut: “Menurut saya Akuntansi sangat berperan dalam pembuatan RKP-Desa karena dalam menetapkan RKP-Desa yang dananya bersumber dari dana APBDesa yang terbatas maka akuntansi disini berperan untuk dapat digunakan untuk mempertimbangkan biaya yang akan digunakan agar dapat diminimalkan dengan cara meminimalisir dan memperkirakan berapa dana yang sesuai agar rencana kerja tersebut dapat terlaksana dengan baik”

Kegiatan yang menunjukkan adanya visi yang strategis di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yaitu adanya musdes menyusun RKP-Desa dan RPJMDes yang memuat visi misi kepala desa dan segala sesuatu yang akan dikerjakan selama memimpin desa. Contoh kegiatan yang menunjukkan adanya visi yang strategis dalam uraian kegiatan RKP-Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso, yaitu :

1. Penyaluran BLT-DD Covid-19.

Kegiatan yang menunjukkan adanya visi yang strategis dalam kegiatan penyaluran BLT-DD Covid-19 yaitu memilih warga yang membutuhkan serta yang memenuhi syarat-syarat kriteria dalam penerima BLT-DD Covid-19 guna sebagai sasaran yang tepat untuk penyaluran dana desa tersebut.

2. Kegiatan PPKM.

Kegiatan yang menunjukkan adanya visi yang strategis dalam kegiatan PPKM yaitu adanya kegiatan sosialisasi covid-19, bagi-bagi masker, dan penyemprotan cairan desinfektan yang bertujuan guna untuk mengedukasi warga dalam kondisi covid-19 agar warga mempunyai kesadaran untuk lebih menjaga pola hidup sehat.

3. Kegiatan Pembangunan MCK (Mandi Cuci, Kakus).

Kegiatan yang menunjukkan adanya visi yang strategis dalam kegiatan Pembangunan MCK yaitu pengeboran sumber air bersih untuk warga Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso, serta adanya pembangunan kamar mandi umum untuk warga yang tidak memiliki kamar mandi.

Penggunaan model pengukuran kinerja agar dapat mencapai visi yang strategis di dalam organisasi sektor publik juga dapat menggunakan prinsip *New Public Management* (Donaldson

& Davis, 1991). Beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa penggunaan model pengukuran kinerja menggunakan NPM juga dapat menghasilkan kinerja organisasi yang efektif dan membuat pengukuran kinerja yang sesuai, sehingga capaian kinerja akan lebih baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, akuntansi memegang peran yang sangat penting untuk mewujudkan prinsip visi strategis dalam organisasi sektor publik. Akuntansi memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan rencana kerja yang maksimal, dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan rencana kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja berfungsi sebagai pedoman penyusunan anggaran yang disampaikan kepada pemerintah oleh sektor publik untuk menjamin kelangsungan kegiatan yang direncanakan oleh sektor publik.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas

Peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam organisasi sektor publik sangat penting. Akuntansi membantu organisasi di sektor publik memutuskan untuk menggunakan dana APBDes yang dianggarkan untuk melakukan tugas dan wewenang secara efisien dan efektif yang telah diberikan oleh Bupati. (Muchammad Romy Ashari, 2019). Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Edi Suparto selaku Bagian Umum pada Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sebagai berikut: “Dalam mewujudkan prinsip efisiensi dan efektivitas sangat terbantu oleh peran akuntansi, karena dalam mengolah dana APBDes yang telah dianggarkan harus sangat maksimal untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien”. Kegiatan yang menunjukkan adanya Efektivitas di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sebagaimana pengamatan dari peneliti yaitu ada pada kegiatan pengelolaan ADD yang digunakan untuk :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Musyawarah desa dan Insentif RT/RW.
- d. Pengadaan, pembangunan, dan pengembangan sarana dan prasarana kantor desa contohnya pengadaan laptop, proyektor, kursi, lemari arsip, dan tralis di balai desa.
- e. Pembinaan kemasyarakatan serta Penyelenggara ketentraman dan ketertiban.

Sedangkan kegiatan yang menunjukkan adanya Efisiensi di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang di jelaskan sebagai berikut:

- a. Dari proses perencanaan, dana ADD akan mendanai kegiatan musyawarah desa, rencana pembangunan desa (seperti MCK), rapat APBDes, dan rencana yang dituangkan dalam RKP-Desa seperti keperluan jasa dekorasi, alat dan bahan, publikasi dan dokumentasi, upah jasa tenaga kerja, dan makan dan minuman rapat dalam kegiatan Penyaluran BLT-DD, dan kegiatan PPKM yang antara lain yaitu pengadaan sosialisasi mengenai Covid-19, bagi-bagi masker, serta penyemprotan cairan desinfektan.
- b. Dari proses perencanaan, dana ADD akan digunakan untuk pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa dan staff desa Sukowiryo, perlengkapan kantor, listrik dan internet, pembelian alat dan bahan kebersihan, fotokopi dan percetakan.
- c. Dari proses pertanggungjawaban, dana ADD akan digunakan untuk biaya konsumsi kepala desa dan perangkat desa yang melakukan kegiatan pertanggungjawaban dan juga akan

digunakan untuk pembuatan spanduk informasi terkait APBDes yang terpasang di balai Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso.

Hambatan Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan *Good Governance*

Dalam mewujudkan *good governance* dengan peran akuntansi tidak dapat dihindarkan dari hambatan-hambatan yang muncul. Hambatan tersebut dapat mengganggu proses akuntansi yang sedang berlangsung dan berdampak pada kinerja yang dihasilkan. Hal ini perlu dioptimalkan dari berbagai sudut untuk mengatasi kendala pelaksanaan proses akuntansi yang tepat. (Muchammad Romy Ashari, 2019). Hal ini sependapat dengan pernyataan dari Eka Windu selaku Sekertaris Desa pada Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sebagai berikut: “Kendala yang kami hadapi sebenarnya tidak terlalu serius dan signifikan, hanya sebagian SDM yang belum memahami sistem akuntansi, namun hal itu dapat diatasi dengan sosialisasi dan pemaparan sistem akuntansi”. Dapat disimpulkan bahwa, hambatan terhadap peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso tidak begitu serius, hanya membutuhkan sosialisasi mengenai akuntansi serta pemaparan mengenai sistem akuntansi yang digunakan. Kolaborasi antar bidang diperlukan untuk meminimalisir kendala yang ada guna memperlancar proses pencapaian *good governance* dan mencapai kinerja yang optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas pada Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sangatlah penting, karena dalam hal mengerjakan kegiatan tugas atau wewenang yang telah ditetapkan dalam RKP-Desa Sukowiryo yang antara lain adalah Penyaluran BLT-DD Covid-19, PPKM, MCK dimudahkan dengan adanya sistem akuntansi tersebut guna untuk menjadi sebuah patokan untuk menilai baik atau buruknya kinerja Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso tersebut, dan juga dapat mendukung organisasi sektor publik untuk bertanggung jawab atas semua tugas dan wewenang yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dimaksudkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka menjamin keakuratan dan keandalan informasi yang diberikan oleh Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso, peran akuntansi terbukti sangat penting dalam mewujudkan transparansi Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso. Jika ingin menyebarluaskan informasi tentang laporan kegiatan dan kejelasan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa harus akurat dan tersedia dalam spanduk atau banner yang dicetak dan diletakkan di depan balai desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran akuntansi dalam mewujudkan responsibilitas di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sangat penting, karena dapat membantu mempermudah dalam mempertanggung jawabkan penggunaan dana APBDes dan ADD yang telah di anggarkan. Serta dengan adanya penataan dalam melayani masyarakat didesa melalui adanya papan dan banner informasi proses pelayanan, memiliki visi pelayanan yang prima, cepat, dan tepat, tersedia loket pelayanan yang sesuai bentuk pelayanan yang telah diberikan, khusus pelayanan di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso buka selama 24 jam menjadi suatu cerminan atas responsivitas staff desa didalam hal melayani masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian peran akuntansi dalam mewujudkan visi yang strategis Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sangat penting. Karena dapat mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu rencana kerja yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. RKPDesa juga dapat menggunakan model

pengukuran kinerja, yang berupa prinsip *New Public Management*. Berdasarkan hasil penelitian peran akuntansi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sangat penting, karena akuntansi dapat membantu dalam pengelolaan APBDes serta ADD agar dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan serta tugas dan wewenang secara optimal dan tepat waktu. Akuntansi juga berperan penting dalam menetapkan jadwal rencana kerja untuk melaksanakan kewajiban dan wewenang yang diberikan oleh Bupati secara efisien dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian hambatan-hambatan yang terjadi didalam mewujudkan *Good Governance* Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso tidak begitu signifikan, Dikarenakan pada menjalankan tugasnya akuntansi ditunjang menggunakan teknologi dan fasilitas yang sangat baik hanya saja diperlukan sumber daya manusia yang baik agar Proses pencapaian *good governance* berjalan lancar dan membutuhkan kerjasama antar bidang untuk mengatasi kendala yang ada untuk mencapai hasil yang optimal. Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso di harapkan dapat mempertahankan kinerja yang telah dilakukan selama ini, dikarenakan kinerja yang telah dilakukan sudah bagus karena telah dapat menerapkan prinsip *Good Governance* yang di antaranya yaitu Akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, visi yang strategis, dan efisiensi dan efektivitas. Untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, visi strategis, efisiensi dan efektivitas, tetapi juga menambahkan prinsip kewajaran agar hasil penelitian selanjutnya tetap terjaga dan menghasilkan penelitian yang lebih baik dan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Hersey, Paul dan Kenneth. H. Blanchard, Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Terjemahan Agus Dharma, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Mahsun. 2007. Metode Penelitian Bahasa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- McGregor, Douglas, 2000. The Piman Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill.
- Muchammad Romy Ashari, I. B. R. (2019). Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 6.
- Napisah, L. S. (2015). Peran Akuntan Dalam Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Di Indonesia. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 97-106.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 79-88
- Puspawati, A. A. (2016). Penerapan New Public Management (Npm) Di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan

- Pelayanan Publik). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i1.426>
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18.
- Sofyan Syafri Harahap. 2015. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Susilawati, E. (2017). Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 3(2).
- Tachyan, Z. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 29-44.